KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

W8BFTFQZ

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 4 4 6			H.4 X	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke-	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 08 330 769 4 721 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : DRADJAT WITJAKSONO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	3.617.500	3.617.500	0	5	180.875	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022							
	Nama Dok	umen Biaya Pembayaran	en Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy				
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor : Tanggal							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0							
C.2 Nama In							
C.3 ID Subu	nit Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	1 3 dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Po	enandatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyata	aan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik	pahwa bukti Pemotongan/Pemungu 	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	κ mengatur bahwa α	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	